

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 2003).
- Adnan Buyung Nasution, *Dua tahun berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2012).
- _____, *Bantuan Hukum di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: LP3ES, 2006)
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008)
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001).
- Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Kencana Prenada Media Grup, 2008).
- Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2002).
- Cornelius Gea, *Analisis Perbandingan Akses Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Semarang Sebelum Adanya Undang-Undang Nomor 16 dengan Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011* (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017).
- Diaz dalam Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2004).
- Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Fariz Ghazian Hafizhuddin Ijhar, *Pelaksanaan Tugas , Hak dan Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum* (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017).
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

- ILRC & Forum Solidaritas LKBH Kampus, *Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal: Position Paper RUU Bantuan Hukum dan Peran LKBH Kampus*, (Jakarta, 2010).
- Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, (Bandung, 2008).
- John Rawls, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013).
- J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003).
- Lewis dalam Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: Intimedia, 2009).
- Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik; Dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hak-hak (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat, Edisi Revisi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).
- Pidato Pengukuhan Moh. Mahfud MD, “*Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*”, dalam *Abdul Ghofur Anshori & Sobirin Malian, Membangun Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008).
- Prof. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra aditya bakti, 2004).
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001).
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta, 2008).
- Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: BP FH UI, 2005).
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung, 2003).
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Yesmil Anwar dalam Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Bantuan Hukum

Jurnal

Muhammad Syaifuddin, dkk, *Demokratisasi Peraturan Daerah Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan*, (Masalah-Masalah Hukum, Jilid 39 No. 2, Juni 2010).

I Komang Suka'arsana dan Maria Silvy E. Wangga, *Pengesampingan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara*, (Masalah-Masalah Hukum, No. 1, Januari 2016)

Internet

Angka kemiskinan di Kota Semarang, (13 Februari 2019) diakses dari <http://jateng.tribunnews.com/2019/01/18/387-juta-warga-jawa-tengah-masih-ada-di-garis-kemiskinan-segini-pendapatan-per-kapitanya>

Garis kemiskinan menurut BPS, (26 Februari 2019) diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>

Kasus yang ditangani oleh LBH Apik, (13 Februari 2019) diakses dari <http://lbhapiksemarang.blogspot.com/2016/>

